

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

NOMOR 18 TAHUN 2018

TENTANG

PETUGAS PENGELOLA PERSEDIAAN UNIT KERJA ESELON II
TAHUN ANGGARAN 2018 DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang persediaan di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka dipandang perlu untuk menunjuk pegawai sebagai Petugas Pengelola Persediaan Unit Kerja Eselon II di Lembaga Kebijakan Pengadaan barang /Jasa Pemerintah;

b. bahwa pegawai yang namanya tertera dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk menjadi Petugas Pengelola Persediaan Unit Kerja Eselon II;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Tentang Petugas Pengelola Persediaan Unit Kerja Eselon II Tahun Anggaran 2018 di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5533);
4. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
6. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PETUGAS PENGELOLA PERSEDIAAN UNIT KERJA ESELON II TAHUN ANGGARAN 2018 DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Petugas Pengelola Persediaan Unit Kerja Eselon II Tahun Anggaran 2018 di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Petugas Pengelola Persediaan Unit Kerja Eselon II sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pemasukan dan pembaharuan data ke dalam Aplikasi Persediaan dan Sistem Informasi Rumah Tangga;
- b. Menyusun laporan persediaan periode Semester I, II dan Tahunan;
- c. Mendokumentasikan arsip barang persediaan;
- d. Melaksanakan cek fisik barang persediaan; dan
- e. Melaksanakan kegiatan lain yang berkaitan dengan pengelolaan barang persediaan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Petugas Pengelola Persediaan Unit Kerja Eselon II melakukan koordinasi dengan Biro Umum dan Keuangan dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Biro/Direktur di Unit Kerja Eselon II;
- KEEMPAT : Masa kerja Petugas Pengelola Persediaan Unit Kerja Eselon II sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sejak ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan bulan Desember Tahun 2018.
- KELIMA : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Petugas Pengelola Persediaan Unit Kerja Eselon II Tahun Anggaran 2018 di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diberikan honorarium berdasarkan pelaksanaan kegiatan pengelolaan Persediaan Unit Kerja Eselon II Tahun Anggaran 2018 di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang besarnya sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2018.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 21 Maret 2018
SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

SALUSRA WIDYA

Tembusan disampaikan kepada :

1. Kepala Biro Umum dan Keuangan;
2. PPK Biro Umum dan Keuangan;
3. Bendahara Pengeluaran LKPP; dan
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG PETUGAS PENGELOLA
PERSEDIAAN UNIT KERJA ESELON II
TAHUN ANGGARAN 2018 DI
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH.

NOMOR : 18 TAHUN 2018
TANGGAL : 21 Maret 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN BESARAN HONORARIUM
PETUGAS PENGELOLA PERSEDIAAN UNIT KERJA ESELON II
DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
TAHUN ANGGARAN 2018

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Unit Kerja Eselon II	Honorarium (Rp)
1	Penanggung Jawab	Dwi Wahyuni Kartianingsih	Biro Umum dan Keuangan	450.000
2	Ketua	Moch Zaini	Biro Umum dan Keuangan	400.000
3	Sekretaris	Kurnia Sari	Biro Umum dan Keuangan	300.000
4	Anggota	1. Satriyo Wibowo	Biro Umum dan Keuangan	300.000
		2. Intan Dana Lestari	Biro Umum dan Keuangan	300.000
		3. Angga Fariz Prayoga	Biro Umum dan Keuangan	300.000
		4. Nur Hartoyo	Biro Umum dan Keuangan	300.000
		5. Rati Karimah	Biro Umum dan Keuangan	300.000
		6. Muhammad Irsyan Halomoan	Biro Umum dan Keuangan	300.000
		7. Adi Irawan	Biro Umum dan Keuangan	300.000
		8. Setiawan Rahandi Sabri	Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata laksana	300.000
		9. Andi Setya Nugraha	Biro Umum dan Keuangan	300.000
		10. Dede Agustina Muhajirin	Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian	300.000

	11. Eva Sinaga	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum	300.000
	12. Oktrita Purwantari Rahayu	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus	300.000
	13. Syukri	Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional	300.000
	14. Winny Adlina Pratomo	Direktorat Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Pengadaan	300.000
	15. Rr.Ajeng Kusharyeni Pratiwi	Direktorat Pengembangan Sistem Katalog	300.000
	16. Vialita Octaviani	Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	300.000
	17. Kemala De Kristie	Direktorat Pengembangan Profesi	300.000
	18. Juniarty Erika MS	Pusdiklat	300.000
	19. Manshur Riadli	Direktorat Sertifikasi Profesi	300.000
	20. Ali Masrochan	Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah I	300.000
	21. Hendra Damendra Numberi	Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II	300.000
	22. Inamawati Mastuti Dewi	Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum	300.000
	23. Bretty Rachayu Budyanty	Inspektorat	300.000

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

SALUSRA WIDYA